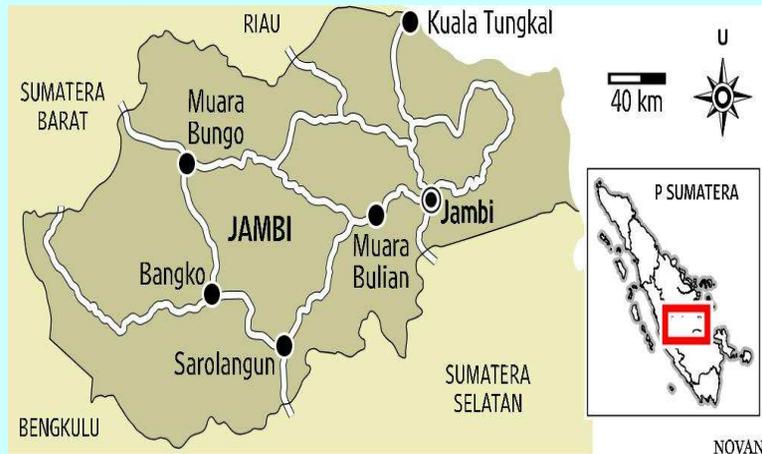


Bangun Koridor Satwa

Kurangi Konflik Harimau Melawan Manusia



Jambi, Kompas - Untuk mengurangi konflik manusia dengan satwa liar di kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi Jambi perlu membuat aturan agar pengusaha tanaman industri dan perkebunan sawit membangun koridor atau penyangga berupa hutan alam agar satwa-satwa liar itu dapat hidup.

Aktivis lingkungan dari Komunitas Konservasi Indonesia Warsi di Jambi, Rudi Syaf, mengatakan, aturan itu perlu segera direalisasikan agar tidak ada lagi korban jiwa menyusul konflik manusia dengan harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) pada sebulan terakhir. Waktu itu, seorang warga asal Pacitan, Jawa Timur, tewas dan empat orang lainnya terluka.

Menurut dia, koridor satwa dibangun khusus bagi empat satwa liar endemik di daerah tersebut, yaitu harimau sumatera, gajah sumatera, orangutan, dan badak. "Pengusaha harus menyisihkan lahan kelolaannya untuk koridor di sepanjang wilayah perkebunan dengan lebar setidaknya 300 meter-500 meter. Dengan menyisihkan lahan, pengusaha telah memperkecil konflik satwa liar dan manusia," ujar Rudi.

Sepanjang koridor itu, tambah Rudi, berupa hutan alam yang memungkinkan beragam satwa pemangsa dan mangsa hidup. "Dengan banyaknya hewan mangsa, satwa seperti harimau sumatera tak akan lagi masuk ke permukiman untuk mencari makan," tuturnya.

Konflik menguat

Selama ini, diakui Rudi, meski konflik antara harimau dan manusia semakin menguat, penyelesaiannya tak pernah tuntas. "Besarnya tekanan masyarakat mendorong otoritas mengorbankan harimau dengan cara menangkapnya. Padahal, lokasi konflik tersebut merupakan ruang jelajah harimau. Dulunya memang hutan, tetapi sudah dibuka sehingga ruang hidup harimau makin menyempit," ucapnya.

Sejauh ini, ada sekitar 90 ekor harimau sumatera di Jambi yang memiliki ruang jelajah hampir 2 juta hektar, tetapi kini tinggal 1 juta hektar akibat pembukaan hutan dan perkebunan sawit. Kawasan yang tersisa itu kini berupa taman nasional dan hutan lindung.

Dari laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, tercatat 12 laporan warga di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi terkait dengan konflik manusia dan hewan. "Kami memasang perangkap, tetapi belum berhasil mengamatkannya. Kami harus mengamankan karena masyarakat resah dan perburuan harimau juga meningkat," kata Tri Siswo, Kepala BKSDA Jambi.

Petisi ke FAO

Untuk melindungi lahan pertanian di Jambi, Ketua Gabungan Kelompok Tani Mersam, Batanghari, Azmi menyampaikan petisi kepada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) karena semakin maraknya penerbitan izin untuk pembukaan kebun sawit pada areal tanaman pangan.

Tercatat, dalam petisi itu, ada sekitar 200 petani yang menolak peralihan lahan pertanian jadi kebun sawit dan lainnya. (ITA)